

BPKK *Launching Website*
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BELUM SEMPURNA



sinarharapan.co

Reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah lama dilaksanakan, berbagai persoalan dan proses pembelajaran menuju pengelolaan keuangan daerah yang baik memang belum mencapai kestabilan yang sempurna namun transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah mengalami kemajuan yang berarti.

Membaiknya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari tahun ke tahun ditandai dengan kemajuan signifikan yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon dan itu merupakan modal yang kuat untuk membangun transparansi pengelolaan keuangan daerah. “Opini BKP sebagai fungsi kontrol menjadi tantangan bagi transparansi pengelolaan keuangan di Ambon dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah,” ungkap Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, AG Latuheru saat *launching website* Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Ambon yang berlangsung di lantai II Balai Kota, Jumat (22/5).

Menurutnya, dalam rangka peningkatan pelayanan dan transparansi pengelolaan keuangan, maka dapat disimpulkan pola-pola pelayanan dan transparansi yang disajikan belum menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat. Minimnya akses masyarakat terhadap pengelolaan keuangan di Ambon dan pola informasi kepada masyarakat yang masih konvensional, maka pemerintah berhak memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui *website* pemerintah. Faktor pemicu lemahnya informasi masyarakat, karena budaya tertutup terhadap pengelolaan keuangan dan kurangnya inovasi terhadap penyajian informasi masih diterapkan kepada masyarakat. “Untuk itu perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi serta efektivitas tersistem dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah, sehingga bukan hanya pemerintah saja yang tahu namun juga masyarakat itu sendiri,” ujarnya.

Dikatakan, dengan kehadiran *website* BPKK Ambon dan Buku Profil Keuangan, merupakan suatu wujud nyata reformasi birokrasi dalam bidang pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, BPKK Ambon juga merupakan unsur penunjang

Pemkot Ambon yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris, sehingga ketersediaan informasi keuangan yang komperhensif perlu diberikan kepada masyarakat “Pengelolaan keuangan yang baik tentu harus sejalan dengan visi dan misi pemkot, baik pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang. Jadi pengelolaan keuangan yang baik menunjukkan daerah memiliki komitmen dan integritas untuk menjadi lebih baik,” tukasnya.

Sementara itu, Kasubbid Perencanaan Anggaran pada BPKK Ambon, Apries Benel Gaspersz menjelaskan, masyarakat dapat mengakses kerja pemerintah khususnya pengelolaan keuangan melalui *website bpkk-ambon.go.id*. *Website* ini dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik serta akses bagi masyarakat tentang pengelolaan keuangan di Kota Ambon.

Sumber Berita :

Harian Siwalima, 23 Mei 2015.

Catatan :

- Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
- Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- Opini adalah kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan; Pernyataan atau pendapat professional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (Adequate Disclosures), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
- Opini BPK terdiri dari :
 1. **Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer Of Opinion*)**, Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.

2. **Opini Tidak Wajar (*Adversed Opinion*)**, pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
3. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)**, pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.
4. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)**, pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar : dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.